

Analisis Pembangunan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Sumatera Barat

Jean Elikal Marna^{1*}, Gusma Yeni², Hefrizal Handra³, Efa Yonnedi⁴

^{1,2}Universitas Negeri Padang, ^{1,3,4}Universitas Andalas

*Corresponding author, e-mail: jeanelikal@fe.unp.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.24036/011208080>

Diterima: 08-12-2022

Revisi : 12-12-2022

Available Online: 13-12-2022

KEYWORD

fiscal independence, economic development, economic growth, unemployment, and poverty

A B S T R A C T

This study aims to find out how fiscal independence and economic development in West Sumatra can affect regional development in West Sumatra, by testing the effect of economic growth, poverty rates and unemployment rates on fiscal independence in the province of West Sumatra in 2011-2020. This type of research is a quantitative descriptive research. This study uses an analytical model of multiple regression analysis techniques. The data used in this study is secondary data with the nature of time series data from 2011-2020 obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The results of this study show that: the economic growth variable has a significant effect on fiscal independence, and the unemployment rate variable also has an effect on fiscal independence in the province of West Sumatra, while the poverty rate variable has a negative and insignificant effect on the fiscal independence of the province of West Sumatra



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu daerah otonom Sumatera Barat terus melakukan pembangunan diberbagai bidang guna mendorong kemajuan pembangunan daerah dan menciptakan daerah yang mandiri sebagai bentuk pencapaian keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam mengelola daerahnya sendiri agar tercipta daerah yang mandiri yang mampu mengelola sumber daya daerahnya secara efisien dan optimal yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan pusat. Selain itu tujuan dari ditetapkannya otonomi daerah bertujuan membatasi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Huda & Sumiati, 2019). Selain itu tujuan penyerahan Kewenangan dalam melaksanakan otonomi daerah adalah meningkatnya kesejahteraan manusia, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghargaan kepada budaya lokal, serta perhatian terhadap potensi dan keragaman daerah (Bratakusmah & Solihin, 2004)

Salah satu bentuk kebijakan otonomi daerah adalah pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal atau kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal adalah kemandirian pendapatan suatu daerah atau negara dalam membiayai kegiatan atau aktivitas-aktivitas ekonominya Pendapatan daerah yang menjadi fokus dari kemandirian fiskal adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). Kontribusi PAD yang tinggi terhadap total pendapatan daerah, maka akan meningkatkan kemandirian fiskal atau tingkat kemandirian keuangan daerahnya,

dan sebaliknya. Menurut Musgrave (1989), tingkat kemandirian fiskal dapat diukur dengan memperbandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan suatu daerah.

Konsep desentralisasi fiskal juga dikenal sebagai money follow function dalam artian pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah disertakan dengan pemberian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Zulyanto, 2010). Meningkatnya kajian tentang desentralisasi bukan saja dikarenakan kegagalan perencanaan pemerintah pusat dan kepopuleran pertumbuhan dan pemerataan (growth with equity), tetapi juga karena munculnya awareness jika pembangunan merupakan sebuah proses yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dan direncanakan dari pusat karena ada ketidakpastian.

Menurut (Moonti, 2019) desentralisasi dalam otonomi daerah dinilai mampu menjawab tuntutan pemerataan pembangunan daerah yang efektif. Kekuatan keuangan daerah menentukan kemampuan suatu daerah untuk menangani tugas-tugas negara, yaitu. pelayanan kepentingan umum dan pembangunan daerah.. Desentralisasi fiskal atau kemandirian fiskal sebagai salah satu kebijakan otonomi daerah secara perspektif teoritis, pelaksanaannya didasarkan pada tujuan untuk mencapai kemandirian daerah terkhusus untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah serta pertumbuhan daerah dan memberikan layanan unggul kepada masyarakat (Agustina, 2013). Setiap daerah bisa mengembangkan potensinya secara optimal jika kemandirian dapat dicapai (Litvack & Seddon, 1999).

Menurut Kuncoro, keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui indikator moneter dan indikator non-moneter, salah satunya adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari sebuah pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan kemampuan dan kesejahteraan suatu negara atau daerah secara finansial (Fadul, 2019). Pembangunan daerah yang berhasil dapat dilihat dengan adanya hasil nyata berupa pertumbuhan dari program yang dilaksanakan pemerintah, begitu juga dengan pembangunan tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan suatu daerah belum bisa dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusianya masih rendah, karena salah satu tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Menurut beberapa ahli dan peneliti terdapat pengaruh desentralisasi fiskal atau kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satunya Bahl dan Lin (1992) dalam (Saputra & Mahmudi, 2012) memparkan bahwa pelayanan masyarakat yang efisien diharapkan dapat terwujud dengan penyerahan wewenang, pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi yang baik, pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak berada dibawah kemiskinan. Kondisi saat seseorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya seperti rumah, makanan dan pakaian disebut sebagai kemiskinan. Kemiskinan disebabkan terbatasnya pengetahuan, alokasi sumber daya yang sedikit, kondisi perekonomian yang tidak stabil serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga hal ini membuat masyarakat sulit untuk memperoleh pendapatan dan menganggur, dan akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait kemandirian fiskal provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2020, diperoleh hasil bahwa tingkat kemandirian fiskal berada pada kategori "Baik". Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2011 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Berlandaskan penjelasan masalah diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi provinsi Sumatera Barat pada 2011 sampai tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 di provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data sekunder berupa data kemandirian fiskal, data pertumbuhan ekonomi, data tingkat kemiskinan dan data tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 hingga 2020 yang diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Barat. Sifat penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemandirian fiskal dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel bebas

pertumbuhan ekonomi (X1), tingkat kemiskinan (X2) tingkat pengangguran (X3) dan variabel terikat kemandirian fiskal (Y). Data ini diolah dengan menggunakan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis serta mengolah data yang dikumpulkan dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat sebagai instansi resmi terkait. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh tingkat kemandirian fiskal provinsi Sumatera Barat dapat mempengaruhi dan mendorong pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dilakukan pengujian terhadap pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terha Y.

Analisis regresi berganda digunakan jika peneliti melakukan ramalan atau memprediksi keadaan variabel dependen dalam kondisi naik turun, jika lebih dari satu variabel indenpenden sebagai faktor predictor nilai atau angkanya dinaikkan atau diturunkan (Sugiyono, 2017). Untuk melakukan analisis regresi berganda, dibutuhkan minimal 2 variabel independennya. Model persamaan regresi berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

- Y : Kemandirian Fiskal
- X₁ : Pertumbuhan Ekonomi
- X₂ : Tingkat Kemiskinan
- X₃ : Tingkat Pengangguran
- a : Konstanta
- b : Koefisien regresi

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap kemandirian fiskal, maka dilakukan analisis regresi berganda. Berikut adalah hasil estimasi dari analisis regresi berganda :

Hasil Uji t Statistik (Parsial)

Menggunakan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan dilakukan Uji t untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variable bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2017). Hal ini diperlukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Pengujian ini menggunakan signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil (<) dari 0,05 atau t hitung > t tabel, maka secara parsial atau secara mandiri variabel independen berpengaruh terhadap varibel dependen, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar (>) dari 0,05 atau t hitung < t tabel, maka secara mandiri variabel bebas tidak memberikan pengaruh kepada variable terikat. Diketahui bahwa nilai t tabel adalah 2,4469.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda (Uji t)

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Toleranc e	VIF
1	(Constant)	-77.418	64.173		-1.206	.273		
	Pertumbuhan Ekonomi	11.025	4.460	.749	2.472	.048	.411	2.432
	Tingkat Kemiskinan	-14.889	17.442	-.351	-.854	.426	.223	4.475
	Tingkat Pengangguran	34.741	12.965	.919	2.680	.037	.321	3.118

a. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal

Sumber : *Olahan Data SPSS, 2022*

Berdasarkan tabel 1, pada kolom signifikansi terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki signnifikansi sebesar 0,048 yang artinya nilai signifikansi < 0,05 dan jika dibandingkan dengan t tabel dan t

hitung, terlihat bahwa t hitung pertumbuhan ekonomi sebesar 2,472 yang artinya lebih besar dari t tabel yaitu 2,446, sehingga keputusannya adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian fiskal. Sedangkan untuk variabel tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,426, yang mana nilai signifikansi besar dari 0,05 dan t hitungnya adalah sebesar -0,854 yang artinya t hitung lebih kecil dari t tabel, sehingga keputusannya adalah bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal. Untuk variabel tingkat pengangguran diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,037 yang artinya nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan t hitungnya adalah sebesar 2,680 yang mana lebih besar daripada t tabel, sehingga keputusannya adalah bahwa variabel tingkat pengangguran mempengaruhi kemandirian fiskal.

Hasil Uji F Statistik (Simultan)

Menurut (Sugiyono, 2014) uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Uji F adalah untuk menguji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan dan juga memastikan model yang dipilih oleh peneliti cocok. Pengambilan keputusan uji F adalah, apabila nilai F hitung > F table atau nilai prob F-statistik < 0,05, maka artinya keputusannya adalah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila nilai F hitung < F table atau nilai prob F-statistik > 0,05, maka artinya keputusannya adalah variabel bebas secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Diketahui nilai F tabel adalah 4,35. Berikut ini hasil uji F :

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8311.103	3	2770.368	6.837	.023 ^b
	Residual	2431.077	6	405.179		
	Total	10742.180	9			

a. Dependent Variable: KemandirianFiskal

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pengangguran, PertumbuhanEkonomi, Tingkat Kemiskinan

Sumber : *Olahan Data SPSS, 2022*

Berdasarkan tabel 2 diatas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya adalah 0,023 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya adalah sebesar 6,837 yang mana lebih besar daripada F tabel yaitu 4,35, maka sesuai dengan pengambilan keputusan, bahwa variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi kemandirian fiskal.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 ^a	.774	.661	20.129

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pengangguran, PertumbuhanEkonomi, Tingkat Kemiskinan

b. Dependent Variable: KemandirianFiskal

Sumber : *Olahan Data SPSS, 2022*

Untuk mengetahui kontribusi variabel terikat (Y) terhadap variabel bebas (X) (Sujarweni, 2015) dilakukan uji Koefisien determinasi (R²). Dari hasil uji R² bisa diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah regresi linear. Semakin besar R² maka persentase perubahan variabel terikat atau variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X)

semakin tinggi, dan sebaliknya apabila semakin kecil R^2 maka persentase perubahan variabel terikat atau variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah. Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh.

Table 3 diatas memperlihatkan nilai R square adalah sebesar 0,774, yang mana hal ini berarti jika pengaruh variabel X1, X2 dan X3 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 88%.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Fiskal

Kemandirian ekonomi daerah salah satunya ditentukan oleh Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan awal daerah tahunan berpengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi daerah. Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal. Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, menurut Peacock dan Wiseman (1961) dalam teorinya tentang perkembangan pengeluaran, menyatakan bahwa dalam pertumbuhan performa ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pungutan pajak, meskipun tarif pajak tidak meningkat, dan peningkatan penerimaan pajak tersebut juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi maka akan menaikkan penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu komponen terbesar yang menyumbang dalam pendapatan asli daerah. Semakin tinggi jumlah pajak yang diterima maka semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah.

Tingginya pendapatan asli daerah akan menyumbang dan berkontribusi lebih di dalam pendapatan daerah, yang selanjutnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah atau kemandirian fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo & Danuta, 2022) tentang Analisis Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Ekonomi 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur (Periode 2010-2014), yang menemukan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemandirian fiskal. Penelitian lainnya juga memberikan hasil bahwa pembangunan ekonomi dapat mendorong kemandirian fiskal suatu wilayah (Indahyani & priyanka, 2018, Ariansyah & Achmad, 2014, Kusuma, 2016). Jumlah pendapatan masyarakat akan meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, kenaikan pajak dan retribusi yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Kemandirian fiskal yang tinggi ditandai dengan Semakin tinggi pendapatan asli daerah.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Kemandirian Fiskal

Hasil olahan data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Diketahui bahwa penurunan ataupun kenaikan tingkat kemiskinan tidak diiringi oleh kenaikan ataupun penurunan tingkat kemandirian fiskal dan jika dilihat berdasarkan hasil regresi, ditemukan bahwa -0,854 yang mana lebih kecil daripada t tabel, sehingga disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal suatu daerah maka daerah tersebut dikatakan semakin mandiri dalam mengelola berbagai sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Jika rasio kemandirian fiskal daerah tersebut menunjukkan mandiri, maka daerah tersebut juga mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat mempengaruhi rencana pembangunan nasional, berupa penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing dan pertumbuhan sektor-sektor primer dan sekunder. Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah melakukan banyak upaya, salah satunya dengan menyalurkan atau meningkatkan pemberian dana perimbangan, sehingga tingginya dana perimbangan jika diiringi dengan pendapatan asli daerah yang stabil, maka dampaknya terhadap kemandirian fiskal tidak terlihat. Selain itu penduduk miskin di Sumatera Barat rata-rata masih bekerja sebagai petani atau nelayan yang memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam perhitungan garis kemiskinan, terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo & Danuta, 2022) tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan : Studi Empiris di Sumatera Utara, yang mana

memperoleh hasil bahwa kemandirian keuangan daerah atau kemandirian fiskal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa terdapat hubungan negative dari tingkat kemiskinan terhadap kemandirian fiskal turun, (Risalam, 2013, Alwindi, 2017, Suci&Asmara, 2014). Kesanggupan masyarakat membayar pajak dan retribusi akan berkurang dengan meningkatnya kemiskinan, mengakibatkan menurunnya pendapatan daerah.

Tabel 4. Tingkat Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2014

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Kemandirian Fiskal
2011	8,99	127,8
2012	8	107,1
2013	7,56	110,1
2014	6,89	129,7
2015	7,31	135,3
2016	7,09	76,2
2017	6,87	54,9
2018	6,65	57,9
2019	6,42	57,8
2020	6,28	51,2

Sumber : Data BPS dan Data Diolah, 2022

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal dengan signifikansi 0,037, yang artinya tingkat pengangguran berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal (Iqbal, 2022, Febiandani&Suseno, 2016) Pengangguran adalah salah satu permasalahan pembangunan yang sulit untuk diselesaikan, hal ini karena setiap tahunnya jumlah penduduk selalu mengalami pertambahan atau peningkatan, sehingga jumlah pencari kerja juga akan meningkat. Tingginya jumlah pencari kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan ataupun kemampuan dalam menyesuaikan skill dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, akan membuat jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Menurut syahrial dalam (Khadijah, 2018) pendapatan pajak berkurang diakibatkan oleh pengangguran, Ketika pengangguran tersebut dikarenakan rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada akhirnya menyebabkan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah menurun. Pajak yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah, akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Apabila pendapatan asli daerah mengalami penurunan, maka tingkat kemandirian fiskal juga akan mengalami penurunan. Selain itu pengangguran juga merupakan beban yang harus ditanggung pemerintah (Soleh, 2017), biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dengan berbagai program juga akan meningkat. Pada akhirnya pemerintah membutuhkan dana yang lebih tinggi Ketika tingkat pengangguran tinggi sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat jika daerah tersebut tidak memiliki keuangan yang cukup. Dengan kata lain tingkat ketergantungan daerah yang tinggi akibat pengangguran akan mengganggu kinerja keuangan pemerintah daerah (Setiani&Ismunawan, 2022)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Secara Simultan Terhadap Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansinya adalah 0,023 lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya adalah sebesar 6,837 yang mana lebih besar daripada F tabel yaitu 4,35, maka sesuai dengan pengambilan keputusan, bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1), tingkat kemiskinan (X2) dan tingkat pengangguran (X3) secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi kemandirian fiskal. Pengangguran yang tinggi akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang akan menyebabkan

pertumbuhan ekonomi juga menurun, dan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Rendahnya pendapatan masyarakat akan berdampak pada kesulitan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, yang merupakan komponen pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah atau kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang mana kontribusi seluruh variable bebas terhadap kemandirian fiskal adalah 77,4%

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis regresi berganda yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat disimpulkan bahwa, secara parsial pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemandirian fiskal yang mana tingkat signifikansinya adalah 0,048 dan 0,037. Namun tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal, yang artinya, tinggi rendahnya tingkat kemiskinan tidak selalu mempengaruhi kenaikan atau penurunan kemandirian fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zulyanto. 2010. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu". Tesis Dipublikasikan. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang
- Adi, P. H. (2005). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Alhusain, A. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional (C. Firdausy (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alwindi, Riyanda (2017). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Pembangunan Ekonomi 38 Kabupaten Atau Kota Di Jawa Timur (Periode 2010- 2014). Skripsi: FEB Brawijaya
- Ariansyah, M., Amir, A., & Achmad, E. (2014). Tingkat ketergantungan fiskal dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(3), 159-159.
- Asmara, A., & Suci, S. C. (2014). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1).
- Deddy Supriady Bratakusmah, Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Fadul, F. (2019). *Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 1993-2013*. 1–11.
- Febiandani, R., & Suseno, D. A. (2016). Analisis hubungan kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan daerah terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 217-225.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, & A.M. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. In *In Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha* (pp. 126–194). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligencia Intrans Publishing.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Iqbal, M. C. (2022). ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI DI PULAU SUMATERA (Doctoral dissertation, ekonomi pembangunan).
- Khadijah. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia*.
- Kusuma, H. (2016). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Desentralisasi Fiskal dan*

- Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, 9(1), 1-11.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Moonti, R. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance Roy Marthen Moonti. *Substantive Justice, International Jurnal Of Law*, 2(1), 43–53.
- M. Suparmoko. (2002). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. In Monograf.
- Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. Public Finance in Theory and Practise. 1989 Mc Graw Hill Book Company
- Phillips, K. L., & Woller, G. (1997). Does fiscalmdecentralization lead to economic growth?
- Priyaka, R. A., Urip, T. P., & Indahyani, R. (2018) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua Tahun 2010-2016.
- Purnomo, S., & Danuta, K. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan : Studi Empiris di Sumatera Utara. *Journal Economic and Business*, 215–220.
- Risalam, F. (2013). Analisis Tingkat Kemiskinan, Ketersediaan Infrastruktur Sekolah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Fiskal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 12.
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2), 185–199. <http://eprints.upnyk.ac.id/871/>
- Setiani, I. (2022). PENGARUH PENGANGGURAN PERTUMBUHAN EKONOMI KEMISKINAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(3), 261-276.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Statistika Dalam Penelitian*. Alfabeta.
- Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Soleh, A. (2017). Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(2), 83-92.